

Hasil Penelitian

PENGUKURAN INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT DI SUMATERA UTARA TAHUN 2021

(MEASUREMENT OF COMMUNITY LITERATURE DEVELOPMENT INDEX IN NORTH SUMATERA IN 2021)

*Poppy Marlita Hutagalung, Dumora Jenny Margaretha Siagian,
Jonni Sitorus, Ceria Aprilliana*

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara
Jln. Sisingamangaraja No. 198 Medan, 20216
Sumatera Utara - Indonesia
Email: jenny79.siangian@gmail.com

Diterima: 15 September 2022; Direvisi: 22 September 2022; Disetujui: 29 September 2022

ABSTRAK

Tingkat literasi masyarakat memiliki hubungan yang vertikal terhadap kualitas suatu bangsa. Peningkatan kemampuan literasi masyarakat diharapkan dapat berkontribusi positif dalam menumbuhkan kreativitas dan inovasi serta meningkatkan keterampilan dan kecakapan sosial yang sangat dibutuhkan pada era revolusi industri 4.0. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hasil pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat di Sumatera Utara Tahun 2021, mengidentifikasi dan menganalisis kendala dan hambatan yang dihadapi, serta memberikan rekomendasi strategi yang dapat dilakukan perpustakaan dalam meningkatkan indeks pembangunan literasi masyarakat di Sumatera Utara. Urgensi penelitian ini antara lain sebagai upaya untuk memenuhi ketersediaan data yang akurat dan holistik untuk semua jenis perpustakaan baik aspek koleksi, tenaga pelayanan, pemustaka, anggota perpustakaan dan keberadaan anggaran sebagai dasar formulasi kebijakan serta pengembangan dan pembinaan perpustakaan di Sumatera Utara. Metode penelitian dalam kajian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data penelitian menggunakan studi dokumentasi dan kuesioner. Analisis data penelitian menggunakan analisis statistik deskriptif. Hasil penelitian menemukan Indeks Pembangunan Literasi masyarakat di Sumatera Utara pada angka 12,40 masuk dalam kategori cukup. Sementara ada enam aspek yang ditemukan sebagai hambatan dan kendala yang dihadapi perpustakaan di Sumatera Utara dalam meningkatkan angka Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, yakni aspek kelembagaan, aspek pendanaan, aspek sumber daya manusia, aspek sarana/prasarana, aspek bahan koleksi, dan aspek minat baca. Kemudian dari enam aspek tersebut disusun 15 rekomendasi strategi untuk memperkuat peran perpustakaan dalam meningkatkan indeks pembangunan literasi masyarakat di Sumatera Utara.

Kata Kunci: literasi, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, perpustakaan

ABSTRACT

The literacy level of the people has a vertical relationship to the quality of a nation. Improving the skills of community literacy is expected to be able to contribute positively in fostering creativity and innovation as well as improving social skills that are much needed in the era of the industrial revolution 4.0. This study aims to describe the measurement results of the Community Literacy Development Index in North Sumatra in 2021, identify and analyze the obstacles faced, and provide recommendations that libraries can do in increasing the community literacy development index in North Sumatra. The urgency of this research, among others, is an effort to meet the availability of accurate and holistic data for all types of libraries, both aspects of collections, service personnel, users, library members and the existence of a budget as the basis for policy formulation as well as library development in North Sumatra. The research method in this study is quantitative research with a descriptive approach. Collecting research data using documentation studies, and questionnaires. Analysis of research data using descriptive statistical analysis. The results of the study found that the Community Literacy Development Index in North Sumatra at 12.40 was in the

sufficient category. Meanwhile, there were six aspects that were found to be obstacles faced by libraries in North Sumatra in increasing the Community Literacy Development Index, namely institutional aspects, funding aspects, human resources aspects, facilities/infrastructure aspects, collection materials aspects, and reading interest aspects. Then from these six aspects, 15 strategy recommendations were made to strengthen the role of libraries in increasing the index of community literacy development in North Sumatra.

Keywords: literacy, Community Literacy Development Index, library

PENDAHULUAN

Literasi memiliki fungsi penting dalam kehidupan. Kesadaran berliterasi akan mengantarkan sebuah peradaban pada kedudukan yang terhormat. Bangsa yang literate adalah bangsa yang mampu menjawab tantangan zaman. Sebaliknya, bangsa yang tidak literate akan menjelma menjadi sebuah bangsa lemah. Bangsa lemah ini tidak akan pernah mampu merespon tantangan dan rintangan di masa depan. Kemampuan literasi bukan sebatas bisa baca tulis. Perpustakaan Nasional RI menyebutkan bahwa literasi adalah kecakapan, setidaknya ada empat tingkatan literasi yang dijadikan parameter kemajuan. Pertama, kemampuan mengumpulkan sumber-sumber bahan bacaan ataupun informasi yang bermutu. Kedua, kemampuan memaknai yang tersirat dan tersurat. Ketiga, kemampuan menghasilkan ide-ide, gagasan, inovasi, ataupun kreativitas baru. Keempat, literasi adalah kemampuan menciptakan barang/jasa untuk khalayak.

Bangsa Indonesia adalah bangsa dengan tingkat Literasi yang masih rendah walaupun sudah 76 tahun sejak Indonesia menjadi negara merdeka. Berdasarkan survey yang dilakukan Program for International Student Assessment (PISA) yang dirilis Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) pada tahun 2019, Indonesia menempati rangking ke 62 dari 70 negara berkaitan dengan tingkat literasi atau berada pada 10 negara terbawah yang memiliki tingkat literasi rendah. Dalam upaya meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa Indonesia, sebagai salah satu peranan dari perpustakaan adalah sangat perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis karya cetak, dan/atau karya rekam.

Melalui pertumbuhan gemar membaca diharapkan dapat meningkatkan kemampuan literasi masyarakat yang dapat sangat berkontribusi positif dalam rangka membantu menumbuhkan kreativitas dan inovasi serta meningkatkan keterampilan dan kecakapan sosial yang sangat dibutuhkan pada era revolusi industri 4.0. Fang & Wei (2010) menyatakan bahwa kemampuan seseorang dalam membaca pemahaman dan artikel ilmiah akan mendukung

kemampuan literasi sains orang tersebut untuk memahami konten sains.

Terwujudnya pembangunan literasi dan budaya gemar membaca masyarakat merupakan sasaran strategis dari program prioritas nasional perpustakaan tahun 2020-2024. Hal ini dirumuskan sebagai upaya penanganan isu strategis bidang perpustakaan yang sedang berkembang saat ini, yakni rendahnya budaya literasi, inovasi dan kreativitas masyarakat, membaca selain kitab suci baik cetak maupun elektronik baru mencapai 45,72 %, serta penduduk yang mengakses internet masih sebesar 43,47 % (Susenas MSBP, 2018).

Sebagai upaya mewujudkan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan dan Berbasis Inklusi Sosial untuk Memperkuat Budaya Literasi, maka target perpustakaan nasional pada tahun 2024 adalah mencapai 71,3 pada nilai tingkat gemar membaca dan 15 pada indeks pembangunan literasi masyarakat Indonesia. Dari hasil kajian yang dilakukan pada tahun 2020 oleh Perpustakaan Nasional, diketahui bahwa nilai tingkat gemar membaca masyarakat secara nasional masih pada kategori sedang, yakni 55,74, dimana Sumatera Utara pada posisi 53,11. Sedangkan indeks pembangunan literasi masyarakat adalah 12,93 dimana Sumatera Utara pada posisi 14,45. Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Utara juga sudah melakukan pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat tahun 2020 dengan perolehan indeks sebesar 9,75 jauh lebih rendah dari angka pengukuran yang dilakukan Perpustakaan Nasional.

Dampak dari pembangunan literasi masyarakat yang rendah, masyarakat akan cenderung percaya pada informasi yang salah, hoaks, bahkan gemar merendahkan orang lain. Masyarakat yang tidak literat itu berarti sulit memahami realitas, disamping tidak punya kesadaran untuk mencari solusi dari setiap masalah yang timbul. Selain itu kalau pembangunan literasi masyarakat rendah juga akan berdampak atas produktivitas masyarakat, meluasnya angka kemiskinan, tingginya angka putus sekolah anak, kriminalitas dan sikap bijak yang gagal menyeleksi setiap informasi dan perilaku berkomunikasi yang emosional dan penuh sentimen. Guna mewujudkan budaya literasi masyarakat dan tingkat kegemaran

membaca masyarakat yang tinggi, maka pemerintah Sumatera Utara melalui Dinas Perpustakaan Sumatera Utara juga memiliki peran penting dalam merumuskan strategi, kebijakan dan program yang dapat mendukung program nasional tersebut.

Penelitian ini penting dilakukan, sebagai upaya memenuhi permintaan Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan pengukuran kembali atas Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, guna menemukan hambatan dan kendala yang dihadapi dalam meningkatkan indeks pembangunan literasi masyarakat Sumatera Utara, serta menyusun strategi yang dapat meningkatkan nilai tingkat gemar membaca masyarakat dan indeks pembangunan literasi masyarakat. Penelitian ini juga sebagai upaya untuk memenuhi ketersediaan data yang akurat dan holistik untuk semua jenis perpustakaan baik aspek koleksi, tenaga pelayanan, pemustaka, anggota perpustakaan dan keberadaan anggaran sebagai dasar formulasi kebijakan serta pengembangan dan pembinaan perpustakaan di Sumatera Utara.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Agustus hingga November 2021 dan berlokasi pada perpustakaan yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Desain penelitian dilakukan sedemikian rupa untuk menggambarkan fenomena yang secara alami. Teknik *sampling* dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Pertimbangan- pertimbangan yang digunakan untuk pengambilan sampel pada penelitian ini adalah semua perpustakaan di Sumatera Utara yang terakreditasi minimal C. Jumlah sampel yang didapatkan adalah sebanyak 48 perpustakaan terdiri atas: 18 Perpustakaan Sekolah; 12 Perpustakaan Perguruan Tinggi; 11 Perpustakaan Umum; dan, 7 Perpustakaan Khusus, seperti disajikan pada tabel 1.

Pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode penyebaran kuesioner untuk data primer, serta penelusuran dokumentasi untuk data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui angket (kuesioner) kepada responden yang mewakili perpustakaan terpilih sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui dokumentasi dan hasil isian responden terhadap daftar pertanyaan terkait tujuh unsur pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, serta data dokumen jumlah masyarakat usia membaca

dari Badan Pusat Statistik. Analisa data dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif.

Tabel 1. Jenis Perpustakaan Berdasarkan Akreditasi di Sumatera Utara

No.	Jenis Perpustakaan	A	B	C	Jumlah
1.	Perpustakaan Sekolah	2	10	6	18
2.	Perpustakaan Perguruan Tinggi	8	1	1	10
3.	Perpustakaan Umum	1	3	7	11
4.	Perpustakaan Khusus	4	4	1	9
	Jumlah	15	18	15	48

Sumber: Data penelitian (2021)

Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode survey dengan cara mengukur sejumlah Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM) dan Aspek Masyarakat usia baca (AM), dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1) Menghitung Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM) yang terdiri atas Pemerataan Layanan Masyarakat (UPLM1), Ketercukupan Koleksi (UPLM2), Ketercukupan Tenaga Perpustakaan (UPLM3), Tingkat Kunjungan Masyarakat per Hari (UPLM4), Jumlah Perpustakaan Ber SNP (UPLM5), Keterlibatan Masyarakat Dalam Kegiatan Perpustakaan (UPLM6), dan Anggota Perpustakaan (UPLM7); 2) Menghitung Aspek Masyarakat (AM) yaitu Jumlah Penduduk usia baca wilayah setempat 5 sd 59 Tahun (data BPS) yang mutakhir; dan, 3) Menghitung Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, seperti persamaan (1). Metode yang digunakan dalam penelitian disajikan pada Tabel 2.

$$IPLM = \frac{\sum UPLM}{AM} \times 100 \dots\dots\dots(1)$$

Dimana:

- IPLM : Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
- UPLM : Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat
- AM : Aspek Masyarakat usia baca

Tabel 2. Ringkasan Metode Penelitian

Rumusan Masalah/ Tujuan Penelitian	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data	Pengukuran	Teknik Analisis Data
Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Perpustakaan	Penyebaran daftar isian 7 unsur IPLM dan data BPS	Sesuai formula menghitung IPLM $\frac{\sum UPLM}{AM} \times 100$	Statistik Deskriptif
Kendala yang dihadapi perpustakaan	Responden perpustakaan	Penyebaran kuesioner	Skala Likert	Statistik deskriptif

Sumber: Data penelitian (2021)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Provinsi Sumatera Utara. Menurut Peraturan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2020 untuk mengukur dan menghitung indeks pembangunan literasi masyarakat diperlukan beberapa data antara lain: Pemerataan Layanan Perpustakaan, Ketercukupan Koleksi, Ketercukupan Tenaga Pustakawan, Tingkat Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan, Perpustakaan yang memiliki Standar Nasional Perpustakaan (SNP), Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan, Anggota perpustakaan, serta Angka Masyarakat Usia Baca.

Berdasarkan data yang dapat dihimpun dari responden atau informan terpilih, dapat disajikan sebagai berikut: Jumlah penduduk usia baca 5 sd 59 tahun berdasarkan hasil perapihan umur dari data administratif dan Sensus Penduduk (SP) Badan Pusat Statistik Sumatera Utara per September 2020, berjumlah 12.167.356 penduduk. Jumlah perpustakaan dan pemerataan pelayanan perpustakaan disajikan pada tabel 3.

Tabel 3. Pemerataan Pelayanan Perpustakaan

Keterangan	Jumlah	UPLM 1
Jumlah Perpustakaan	11.570	$\frac{11.570}{12.167.356} \times 100 = 0,09$

Berdasarkan tabel 3 diketahui bahwa jumlah perpustakaan yang ada di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 11.570 pustaka yang merupakan jumlah perpustakaan umum, perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi dan perpustakaan khusus.

Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat diperoleh dengan cara membagi jumlah perpustakaan dengan jumlah penduduk usia baca sehingga diperoleh angkanya sebesar 0,09. Untuk mendapatkan rasio ketersediaan perpustakaan di Sumatera Utara berdasarkan jenis perpustakaan belum dapat dihitung karena jumlah per jenis perpustakaan datanya belum diperoleh. Unsur pembangunan literasi masyarakat terkait koleksi perpustakaan disajikan pada tabel 4.

Berdasarkan tabel 4 diketahui bahwa koleksi perpustakaan untuk masing-masing jenis perpustakaan masih bervariasi, terlihat jumlah koleksi di perpustakaan perguruan tinggi yang lebih dominan. Jumlah koleksi ini lebih dominan dalam bentuk cetak atau *hard copy* sementara banyak responden yang tidak mengirimmankoleksi perpustakaan yang berbasis digital.

Artinya kalau koleksi yang bersigat digital juga ikut dihitung maka tentu jumlahnya akan lebih meningkat. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa unsur pembangunan literasi masyarakat yang terkait dengan koleksi perpustakaan atau rasio ketercukupan koleksi per kapita sebesar 9,53. Sementara jika berdasarkan IFLA/UNESCO rasio, ketercukupan koleksi perpustakaan sebesar 2 (dua) kali jumlah penduduk.

Tabel 4. Koleksi Perpustakaan

Keterangan	Jumlah	UPLM 2
Koleksi Perpustakaan		
Perpustakaan PT	670.830	$\frac{1.159.534}{12.167.356} \times 100 = 9,53$
Perpustakaan Sekolah	94.945	
Perpustakaan Umum	370.597	
Perpustakaan Khusus	23.162	
Total	1.159.534	

Ketercukupan tenaga perpustakaan yang merupakan unsur pembangunan literasi masyarakat dapat dilihat pada tabel 5. Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui bahwa jumlah tenaga perpustakaan baik yang berstatus pustakawan maupun tenaga teknis perpustakaan berjumlah 1.992 orang. Jumlah mayoritas masih didominasi oleh tenaga teknis perpustakaan, sementara untuk mereka yang menjadi pustakawan jumlahnya masih tergolong kecil. Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan sebesar 0,02. Padahal idealnya adalah 1: 2.500 artinya satu tenaga pustakawan melayani 2.500 penduduk.

Berdasarkan data pada tabel 6 terkait tingkat kunjungan masyarakat, diketahui bahwa jumlah pengunjung atau pemustaka masih relative kecil. Hal ini karena data yang dikirimkan oleh perpustakaan masih bersifat manual atau pengunjung datang langsung ke perpustakaan, padahal pengunjung yang online tidak diberikan datanya. Tingkat pemanfaatan perpustakaan dinilai dari jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan perhari. Standar minimal merujuk kepada IFLA/UNESCO adalah 2 % dari jumlah penduduk kunjungan perhari. Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat sebesar 0,04 jauh lebih kecil dibandingkan angka ideal UNESCO.

Tabel 5. Ketercukupan Tenaga Perpustakaan

Keterangan	Jumlah	UPLM 3
Ketercukupan Tenaga Perpustakaan		
Perpustakaan PT		
Pegawai Perpustakaan	293	
Pegawai Teknis Perpustakaan	67	
Perpustakaan Sekolah		
Pegawai Perpustakaan	23	
Pegawai Teknis Perpustakaan	80	$\frac{1.992}{12.167.356} \times 100 = 0.02$
Perspustakaan Umum		
Pegawai Perpustakaan	37	
Pegawai Teknis Perpustakaan	1.474	
Perpustakaan Khusus		
Pegawai Perpustakaan	5	
Pegawai Teknis Perpustakaan	13	
TOTAL	1.992	

Tabel 6. Tingkat Kunjungan Masyarakat

Keterangan	Jumlah	UPLM 4
Tingkat Kunjungan Masyarakat		
Perpustakaan PT	1.116	$\frac{5.537}{12.167.356} \times 100 = 0,04$
Perpustakaan Sekolah	1.188	
Perpustakaan Umum	3.148	
Perpustakaan Khusus	85	
Total	5.537	

Tabel 7. Perpustakaan Ber SNP

Keterangan	Jumlah	UPLM 5
Jumlah Pustaka yang Ber-Standar Nasional Perpustakaan	2.741	$\frac{2.741}{12.167.356} \times 100 = 0,02$

Tabel 8. Keterlibatan Masyarakat Dalam Kegiatan Perpustakaan

Keterangan	Jumlah	UPLM 6
Keterlibatan Masyarakat dalam kegiatan perpustakaan		
Perpustakaan PT	12.064	$\frac{50.858}{12.167.356} \times 100 = 0,42$
Perpustakaan Sekolah	1.897	
Perpustakaan Umum	35.654	
Perpustakaan Khusus	1.243	
TOTAL	50.858	

Tabel 9. Anggota Perpustakaan

Keterangan	Jumlah	UPLM 7
Anggota Perpustakaan		
Perpustakaan PT	17.9908	$\frac{276.253}{12.167.356} \times 100 = 2,27$
Perpustakaan Sekolah	9.412	
Perpustakaan Umum	83.298	
Perpustakaan Khusus	3.635	
TOTAL	276.253	

Tabel 10. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

No.	Keterangan	UPLM	IPLM
1.	Jumlah Perpustakaan	$\frac{11.570}{12.167.356} \times 100 = 0,09$	
2.	Koleksi Perpustakaan	$\frac{1.159.534}{12.167.356} \times 100 = 9,53$	
3.	Ketercukupan Tenaga Perpustakaan	$\frac{1.992}{12.167.356} \times 100 = 0,02$	
4.	Tingkat Kunjungan Masyarakat	$\frac{5.537}{12.167.356} \times 100 = 0,04$	$\frac{1.508.485}{12.167.356} \times 100 = 12,40$
5.	Jumlah Pustaka yang Ber-Standar Nasional Perpustakaan	$\frac{2.741}{12.167.356} \times 100 = 0,02$	
6.	Keterlibatan Masyarakat dalam kegiatan perpustakaan	$\frac{50.858}{12.167.356} \times 100 = 0,42$	
7.	Anggota Perpustakaan	$\frac{276.253}{12.167.356} \times 100 = 2,27$	

Selanjutnya unsur pembangunan literasi masyarakat terkait perpustakaan yang sesuai standar nasional perpustakaan disajikan pada tabel 7. Berdasarkan tabel 7 jumlah perpustakaan di Sumatera Utara yang Ber-Standar Nasional Perpustakaan sebanyak 2.741 (sumber Perpustakaan Provinsi Sumatera Utara). Sehingga kalau dibagi dengan jumlah penduduk usia baca maka Unsur Pembangunan Literasi

Masyarakat hanya sebesar 0,02. Perpustakaan berstandar nasional dihitung berdasarkan jumlah perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan (SNP) dibanding total jumlah perpustakaan yang ada di suatu wilayah.

Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan dapat dilihat pada tabel 8. Berdasarkan tabel 8 diketahui bahwa jumlah masyarakat yang terlibat dalam kegiatan yang

dilakukan perpustakaan relatif kecil sebesar 0,42. Pelibatan masyarakat di perpustakaan dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh perpustakaan di satu wilayah.

Selanjutnya, unsur pembangunan literasi masyarakat terkait anggota perpustakaan dapat dilihat pada tabel 9. Berdasarkan tabel 9 diketahui bahwa anggota perpustakaan berjumlah 276.253 belum termasuk dengan anggota perpustakaan yang secara digital. Angka Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat sebesar 2,27 masih relatif sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk usia baca. Setelah menghitung masing-masing Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat, kemudian dihitung Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) maka didapat sebesar 12,40, seperti disajikan pada Tabel 10.

Kemudian nilai IPLM dilihat interval indeksinya sesuai dengan kategori yang ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional, seperti pada Tabel 11. Berdasarkan kategori yang ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional tersebut, maka Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat di Sumatera Utara berada pada kategori **CUKUP**.

Tabel 11. Interval Indeks IPLM

Kategori	Interval Indeks
Rendah	<10,92
Cukup	10,93 – 12,99
Baik	13,00 – 17,72
Sangat Baik	>14,73

Tabel 12. Pedoman Kategorisasi Rata-Rata Skor Tanggapan Responden

Interval Kuesioner	Kategori
1,00 – 1,80	Sangat Tidak Setuju
1,81 – 2,60	Tidak Setuju
2,61 – 3,40	Kurang Setuju
3,41 – 4,20	Setuju

Hambatan dan Kendala yang dihadapi Perpustakaan. Data yang didapatkan dari hasil tanggapan responden digunakan untuk menginterpretasikan pembahasan sehingga dapat diketahui kondisi dari setiap aspek yang diteliti. Dalam menginterpretasikan aspek yang sedang diteliti, maka dilakukan kategorisasi terhadap tanggapan responden berdasarkan rata-rata skor tanggapan responden. Prinsip kategorisasi dilakukan menurut (Sugiyono, 2009) yaitu berdasarkan rentang skor maksimum dan skor minimum dibagi jumlah kategori yang diinginkan dengan menggunakan persamaan (2).

$$\text{Rentang Skor Kategori} = \frac{\text{Skor Maksimum} - \text{Skor Minimum}}{\text{Jumlah Kategori}} \dots\dots\dots (2)$$

Setelah diperoleh kategorisasi rata-rata skor atas tanggapan responden, maka dapat dijelaskan interpretasi atas tanggapan responden tersebut pada setiap aspek yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Aspek Kelembagaan.

Deskripsi frekuensi dari aspek kelembagaan dirangkum pada tabel 13. Berdasarkan tabel 13 Terkait aspek kelembagaan dapat dijelaskan bahwa rata-rata responden (4,22) menjawab sangat setuju atas tidak adanya kesatuan struktur perpustakaan merupakan bukti bahwa aspek kelembagaan perpustakaan sangat rapuh. Sementara rata-rata responden (3,37) menjawab kurang setuju atas pernyataan tidak ada koordinasi struktural antara perpustakaan nasional, perpustakaan provinsi, dan perpustakaan umum melainkan sebatas koordinasi fungsional. Sedangkan rata-rata responden (3,79) menjawab setuju atas pernyataan bahwa perpustakaan sekolah dan perguruan tinggi yang berada di bawah kewenangan Departemen atau Dinas Pendidikan Nasional.

Jawaban responden, jika merujuk kepada Undang-Undang (UU) Nomor 43 tahun 2007 tentang perpustakaan hanya mengatur kelembagaan perpustakaan secara normatif. Selama ini kelembagaan perpustakaan masih belum jelas, masih menumpang pada peraturan dan perundangan lain. Untuk mewujudkan aspek kelembagaan yang kuat, peraturan pelaksana (dalam bentuk Peraturan Pemerintah) perlu secara tegas menentukan status eselon bagi masing-masing jenis perpustakaan.

Perpustakaan umum provinsi berbentuk badan (eselon II A), perpustakaan umum kabupaten/kota berbentuk kantor (eselon III A), perpustakaan umum kecamatan berbentuk UPTD (eselon IV A), perpustakaan desa dan sekolah bereselon IV B. Dengan aturan semacam ini perpustakaan akan lebih diperhatikan oleh pemerintah daerah dan peluang untuk mendapat anggaran yang memadai akan semakin besar.

Aspek kelembagaan menjadi amat penting dalam percepatan fungsi dan kewenangan satuan kerja di daerah. Nomenklatur kelembagaan daerah dirancang dengan memperhatikan akibat dari pengaruh keseluruhan faktor lingkungan strategis, ukuran organisasi, teknologi informasi, dan sasaran yang ingin dicapai organisasi. Kelembagaan perlu di standarisasi agar percepatan tugas dan kewenangan satuan

perangkat daerah dalam mendukung pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik. Standarisasi kelembagaan tersebut mengacu kepada UU Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan daerah, Pasal 12 ayat (2), bahwa perpustakaan merupakan urusan wajib non dasar, serta Undang- Undang No. 43/2007 tentang Perpustakaan, Pasal 5 ayat (1,2,3) bahwa perpustakaan merupakan urusan wajib pemerintah dan hak masyarakat dalam mendukung kualitas hidupnya.

Konsep inilah yang mendasari bahwa kelembagaan perpustakaan harus setara dan sama di seluruh wilayah pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Pemetaan atau tipologi kelembagaan perpustakaan sesungguhnya menjadi penghalang dalam

kesetaraan dan menghapus disparitas layanan pada masyarakat. Perbedaan terletak pada kewenangan urusan yang melekat pada daerah provinsi dan kabupaten/kota.

2. Aspek Pendanaan. Berdasarkan tabel 14 terkait aspek pendanaan, terlihat bahwa rata-rata responden (4,25) menjawab sangat setuju atas aspek kelembagaan yang lemah akan membawa dampak berupa minimnya anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah di bidang perpustakaan. Sementara rata-rata responden (4,02) menjawab setuju atas pernyataan bahwa sesungguhnya Undang- undang Perpustakaan sudah mewajibkan setiap sekolah/ perguruan tinggi untuk mengalokasikan minimal 5% dari APBS untuk perpustakaan, realitas di lapangan hampir tidak ada perubahan.

Tabel 13. Rata-Rata Skor dan Kategorisasi Tanggapan Responden Aspek Kelembagaan

No.	Indikator	Distribusi Tanggapan					Rata - Rata	Kategori
		SS	S	KS	TS	STS		
1. ASPEK KELEMBAGAAN								
1.	Tidak adanya kesatuan struktur perpustakaan merupakan bukti bahwa aspek kelembagaan perpustakaan sangat rapuh	20	24	1	1	2	4,22	Sangat Setuju
2.	Tidak ada koordinasi struktural antara perpustakaan nasional, perpustakaan provinsi, dan perpustakaan umum melainkan sebatas koordinasi fungsional.	8	19	9	7	5	3,37	Kurang Setuju
3.	Perpustakaan sekolah dan perguruan tinggi yang berada dibawah kewenangan Departemen / Dinas Pendidikan Nasional	11	25	6	4	2	3,79	Setuju

Tabel 14. Rata-Rata Skor dan Kategorisasi Tanggapan Responden Aspek Pendanaan

No.	Indikator	Distribusi Tanggapan					Rata - Rata	Kategori
		SS	S	KS	TS	STS		
2. ASPEK PENDANAAN								
1.	Aspek kelembagaan yang lemah akan membawa dampak berupa minimnya anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah di bidang perpustakaan	21	24	2	0	1	4,25	Sangat Setuju
2.	UU Perpustakaan sudah mewajibkan setiap sekolah / perguruan tinggi untuk mengalokasikan minimal lima persen dari APBS untuk perpustakaan, realitas dilapangan hampir tidak ada perubahan	15	22	8	2	1	4,02	Setuju

Reformasi birokrasi mendorong agar diadakannya upaya peningkatan kinerja di bidang pengelolaan keuangan dengan pendekatan yang lebih sistematis berbasis kinerja. Kesenjangan atau disparitas pembangunan perpustakaan selama ini bukan saja persoalan kebijakan yang tidak berpihak, tetapi juga persoalan rendahnya pendanaan APBD Provinsi dan kabupaten/kota. Pendanaan kegiatan perpustakaan acap kali kandas di meja perencana pembangunan daerah dengan alasan perpustakaan bukan urusan pelayanan dasar.

Mengacu kepada Undang-Undang No.43/2007 tentang Perpustakaan, dalam pasal 39 ayat (1) menjelaskan pendanaan perpustakaan menjadi tanggung jawab penyelenggara perpustakaan. Kemudian bagaimana tanggung jawab negara dalam pendanaan perpustakaan diatur dalam pasal 39 ayat (2) bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengalokasikan anggaran perpustakaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD). Untuk pelaksanaannya tergantung dari masing-masing Lembaga sehingga perolehan dana dapat dijabarkan berasal dari: APBN, APBD/DIPA, APB Sendiri (Intern), Yayasan, Donatur, Sponsor, Masyarakat.

Lebih lanjut pada pasal 40 disebutkan bahwa: 1) pendanaan perpustakaan didasarkan pada prinsip kecukupan dan berkelanjutan, 2) Pendanaan perpustakaan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan atau anggaran pendapatan dan belanja daerah,

Sebagian anggaran Pendidikan, sumbangan masyarakat yang tidak mengikat, kerja sama yang menguntungkan, bantuan luar negeri yang tidak mengikat, hasil usaha jasa perpustakaan dan atau sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pengelolaan dana perpustakaan dilakukan secara efisien, berkeadilan, terbuka, terukur, dan bertanggung jawab.

3. Aspek Sumber Daya Manusia.

Berdasarkan tabel 15, terkait aspek sumber daya manusia dapat dijelaskan bahwa rata-rata responden (4,6) menjawab sangat setuju atas aspek pustakawan merupakan ujung tombak bagi keberhasilan suatu perpustakaan dalam meningkatkan minat baca masyarakat. Responden (4,08) setuju bahwa profesi pustakawan ini ternyata belum memperoleh perhatian yang layak dari pemerintah (terutama pemerintah daerah) dan institusi lainnya. Sedangkan responden (4,0) setuju atas pernyataan bahwa pada setiap rekrutmen CPNS, jarang sekali pemerintah daerah di Indonesia yang mengajukan formasi CPNS untuk jabatan fungsional pustakawan bagi para lulusan Sarjana dan Diploma III Perpustakaan.

Pada perpustakaan jenis apapun sumber daya manusia merupakan unsur yang sangat penting karena merupakan ujung tombak dan ujung kekuatan proses pemberian dan penerimaan informasi dari sumber informasi dalam hal ini pengelola perpustakaan dan pemanfaat informasi atau pengguna (pemustaka). Pustakawan sangat berperan dalam meningkatkan minat baca masyarakat.

Tabel 15. Rata-Rata Skor dan Kategorisasi Tanggapan Responden Aspek SDM

No.	Indikator	Distribusi Tanggapan					Rata - Rata	Kategori
		SS	S	KS	TS	STS		
3. ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)								
1.	Pustakawan merupakan ujung tombak bagi keberhasilan suatu perpustakaan dalam meningkatkan minat baca masyarakat	27	19	2	2	0	4,6	Sangat Setuju
2.	Profesi pustakawan ini ternyata belum memperoleh perhatian yang layak dari pemerintah (terutama pemerintah daerah) dan institusi lainnya	16	22	9	0	1	4,08	Setuju
3.	Pada setiap rekrutmen CPNS, jarang sekali pemerintah daerah di Indonesia yang mengajukan formasi CPNS untuk jabatan fungsional pustakawan bagi para lulusan Sarjana dan Diploma III Perpustakaan.	17	18	10	2	1	4,0	Setuju

Mengacu kepada Undang-Undang No.43 tahun 2007, pasal 29 ayat (1) menyatakan bahwa tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan. Pustakawan harus memenuhi kualifikasi sesuai standar nasional perpustakaan. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui Pendidikan dan atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.

Pustakawan yang berkualitas ialah pustakawan yang mampu berperan sebagai agen informasi, ilmuwan, dan pendidik. Andy Alayyubi (2001) mengungkapkan bahwa pustakawan yang ideal selain profesional ia juga seorang ilmuwan. Selain itu salah satu kendala utama dalam pengembangan perpustakaan di tanah air adalah masih minimnya jumlah pustakawan cukup banyak perpustakaan yang belum memiliki tenaga pustakawan.

4. Aspek Sarana/Prasarana.

Berdasarkan tabel 16 terkait aspek sarana/prasarana dapat dijelaskan bahwa rata-rata responden (4,6) menjawab setuju atas pernyataan bahwa gedung/ ruang perpustakaan belum memperoleh tempat yang terhormat di lingkungan pemerintah kabupaten/kota, sekolah, perguruan tinggi maupun desa. Namun untuk pernyataan

gedung/ruang perpustakaan pada umumnya berada dalam keadaan memprihatinkan dan terletak di tempat yang “terbelakang”, “tersembunyi” dan tidak strategis serta ruang perpustakaan sekolah/kampus dan lainnya biasanya hanya memanfaatkan “ruangan sisa” yang ada di lingkungan sekolah/kampus dan lainnya mayoritas responden menyatakan kurang setuju (3,04 dan 3,0).

Sebagai upaya mendukung pelaksanaan pelayanan yang prima atau terbaik, maka perpustakaan sebagai institusi yang bergerak di bidang jasa perlu memperhatikan sarana dan prasarana baik berupa gedung yang representatif maupun peralatan dan perlengkapan perpustakaan lainnya yang dibutuhkan. Sejalan dengan hasil penelitian Muslimin (2018) menunjukkan bahwa minat membaca masyarakat masih rendah, salah satunya diakibatkan kurangnya fasilitas sarana prasarana membaca terhadap masyarakat desa yang rata-rata tingkat pendidikan adalah lulusan SD, putus sekolah dan buta huruf.

Guna meningkatkan minat baca dan menumbuhkan budaya literasi, perlu diterapkan berbagai strategi perencanaan yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, seperti penyediaan fasilitas perpustakaan masyarakat berbasis teknologi informasi, dan memungkinkan mahasiswa KKN untuk mengajar membaca dan menulis (Muslimin, 2018).

Tabel 16. Rata-Rata Skor dan Kategorisasi Tanggapan Responden Aspek SarPras

No	Indikator	Distribusi Tanggapan					Rata - Rata	Kategori
		SS	S	KS	TS	STS		
4. ASPEK SARANA / PRASARANA								
1.	Gedung/ruang perpustakaan belum memperoleh tempat yang terhormat di lingkungan pemerintah kabupaten / kota, sekolah, perguruan tinggi maupun desa	8	19	11	6	4	3,43	Setuju
2.	Gedung/ ruang perpustakaan pada umumnya berada dalam keadaan memprihatinkan dan terletakdi tempat yang “terbelakang”, “tersembunyi dan tidak strategis.	7	12	12	8	9	3,04	Kurang Setuju
3.	Ruang perpustakaan sekolah / kampus dan lainnya biasanya hanya memanfaatkan “ruangansisa” yang ada dilingkungan sekolah / kampus dan lainnya	5	14	11	12	6	3,0	Kurang Setuju

Tabel 17. Rata-Rata Skor dan Kategorisasi Tanggapan Responden Aspek Bahan Koleksi

No.	Indikator	Distribusi Tanggapan					Rata - Rata	Kategori
		SS	S	KS	TS	STS		
5. ASPEK BAHAN KOLEKSI								
1.	Kelemahan utama perpustakaan selama ini adalah minimnya pengadaan bahan pustaka baru setiap tahun.	19	19	5	2	3	4,02	Setuju
2.	Pengadaan bahan pustaka baru sangat berguna untuk menyegarkan koleksi bahan pustaka yang ada, sekaligus untuk menggantikan bahan pustaka yang sudah kadaluwarsa untuk stok opname.	27	20	1	0	0	4,54	Sangat Setuju
3.	Penyusunan judul buku untuk perpustakaan yang lebih mengedepankan mentalitas proyek dengan mengambil judul buku hanya dari satu penerbit yang memberikan komisi tertinggi. Atau Perpustakaan hanya pasrah seratus persen kepada toko/distributor buku untuk pengadaan bahan Pustaka	3	12	13	12	8	2,79	Kurang Setuju

Perkembangan perpustakaan yang semakin pesat harus didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana ruangan yang optimal, misalnya bila perpustakaan ingin menyediakan ruang publik sebagai area diskusi bagi pemustaka, maka ruangan tersebut perlu dilengkapi dengan perlengkapan seperti pendingin ruangan (AC), LCD, teater mini yang bertujuan meningkatkan kenyamanan pemustaka saat menggunakan layanan. Apapun peralatan dan perlengkapan yang dipilih semuanya harus memiliki nilai ekonomis, estetis, fungsional, tahan lama serta mudah pemeliharaannya. Perpustakaan perlu memperhitungkan fleksibilitas penataan perlengkapan, hal ini dimaksudkan agar perlengkapan yang ada mudah dipindahkan sesuai kebutuhan dan ketersediaan ruangan.

5. Aspek Bahan Koleksi. Deskripsi frekuensi dari aspek bahan koleksi dirangkum pada tabel 17. Berdasarkan tabel 17 Terkait aspek bahan koleksi dapat dijelaskan bahwa rata-rata responden (4,54) menjawab sangat setuju atas pernyataan bahwa pengadaan bahan pustaka baru sangat berguna untuk menyegarkan koleksi bahan pustaka yang ada, sekaligus untuk menggantikan bahan pustaka yang sudah kadaluwarsa untuk stok opname.

Sementara ada responden (4,02) setuju bahwa kelemahan utama perpustakaan selama ini adalah minimnya pengadaan bahan pustaka baru setiap tahun. Sedangkan ada responden (2,79) kurang setuju bahwa penyusunan judul

buku untuk perpustakaan yang lebih mengedepankan mentalitas proyek dengan mengambil judul buku hanya dari satu penerbit yang memberikan komisi tertinggi. Atau Perpustakaan hanya pasrah seratus persen kepada toko/distributor buku untuk pengadaan bahan Pustaka.

Semakin bervariasi koleksi sebuah perpustakaan akan semakin menarik hati pemustaka. Menu sajian perpustakaan yang lengkap akan berpeluang besar untuk menghadirkan pemustaka dari berbagai lapisan masyarakat. Salah satu unsur yang memang harus ada di dalam sebuah perpustakaan adalah koleksi bacaan yang baik dan juga memadai. Faktor pengembangan koleksi sangat menentukan dalam upaya pemenuhan kebutuhan tersebut. Koleksi bahan bacaan yang ada didalam perpustakaan dapat disimpan, dapat disajikan, maupun diolah agar menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi pemustaka.

Koleksi Perpustakaan merupakan salah satu penghubung untuk menjembatani pemustaka pada informasi. Koleksi perpustakaan pada masa kini tidak hanya berupa bahan tercetak tetapi termasuk semua media yang memuat nilai pengetahuan dan informasi baik berasal dari koleksi alih media melalui proses digitalisasi atau memang koleksi asli *born digital*. Disamping space untuk penyimpanan koleksi-koleksi perpustakaan ke depan menjadi masalah yang cukup rumit mengingat ruang perpustakaan biasanya

terbatas, koleksi digital menjadi sebuah koleksi alternative karena tidak menyita tempat yang begitu besar. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan koleksi dasar perpustakaan berupa buku referensi, majalah ilmiah dan buku teks yang terkait langsung dengan subjek yang menjadi lingkup misi perpustakaan sebagai koleksi penunjang perpustakaan.

Kebijakan pengembangan koleksi juga berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan berkembangnya teknologi yang semakin *modern*, koleksi bahan perpustakaan sudah dapat disajikan dalam bentuk digital. Perpustakaan sudah harus mulai melakukan percepatan pengadaan koleksi berbasis digital seperti *e-jurnal*, *e-book*, dan koleksi digital sejenis lainnya.

6. Aspek Minat Baca. Berdasarkan tabel 18 terkait aspek minat baca dapat dijelaskan bahwa rata-rata responden (4,04) menjawab setuju atas pernyataan bahwa Minat baca masyarakat yang rendah hendaknya tidak dijadikan "legitimasi" atau alasan pembenaran bagi terpuruknya dunia perpustakaan secara umum serta kehadiran perpustakaan memang diharapkan untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Karena jika minat baca masyarakat kita tidak kunjung meningkat, maka hal ini merupakan indikator adanya kebijakan yang salah terhadap perpustakaan di tanah air.

Perpustakaan yang ideal pada dasarnya adalah sebuah perpustakaan yang mampu memberdayakan masyarakat. Perpustakaan yang

mampu melakukan revolusi minat baca pada masyarakat. Mampu mengubah karakter masyarakat dari tidak suka membaca menjadi suka membaca. Mengubah masyarakat tuna informasi menjadi masyarakat yang berliterasi atau melek informasi. Meningkatkan minat baca mau tak mau kini sudah sangat diperlukan. Keadaan dunia yang semakin mengglobal secara tidak langsung telah memaksa kita untuk mempertajam pengamatan kita terhadap informasi-informasi yang beredar. Selain itu, keadaan ini juga telah menuntut kita untuk memperbaiki kualitas diri. Salah satu kunci untuk mencapai beberapa poin tersebut adalah dengan membaca.

Menurut Husnul, Annisa, dan Jamaluddin (2020), penyebab rendahnya kemampuan literasi masyarakat, salah satunya adalah karena kemampuan membaca masyarakat masih rendah. Rendahnya kemampuan membaca ini disebabkan oleh rendahnya minat dan kebiasaan masyarakat untuk membaca. Kurangnya minat baca yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia seharusnya mendorong pihak-pihak yang terkait untuk sesegera mungkin memfasilitasi dan menganalisis apa saja yang menjadi penyebab hal tersebut. Dalam hal ini, tentu sangat diperlukan kerjasama antara penulis, penerbit, dan pemerintah dalam pengadaan sumber bacaan. Hal ini akan lebih baik jika pemerintah memberikan anggaran khusus bagi pemuliaan perpustakaan, karena perpustakaan dapat dijangkau oleh siapa saja dan tentunya lebih efisien bagi mereka yang memiliki dana minim untuk membeli buku.

Tabel 18. Rata-Rata Skor dan Kategorisasi Tanggapan Responden Aspek Minat Baca

No	Indikator	Distribusi Tanggapan					Rata - Rata	Kategori
		SS	S	KS	TS	STS		
6. ASPEK MINAT BACA								
1.	Minat baca masyarakat yang rendah hendaknya tidak dijadikan "legitimasi" atau alasan pembenaran bagi terpuruknya dunia perpustakaan secara umum	13	29	3	1	2	4,04	Setuju
2.	Kehadiran perpustakaan memang diharapkan untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Karena jika minat baca masyarakat kita tidak kunjung meningkat, maka hal ini merupakan indikator adanya kebijakan yang salah terhadap perpustakaan di tanah air	15	27	1	4	1	4,04	Setuju

Rekomendasi Strategi Peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Di Sumatera Utara. Berdasarkan pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang sudah dilakukan kemudian analisis identifikasi hambatan dan kendala yang dihadapi perpustakaan dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat di Sumatera Utara, ada 15 rekomendasi yang dapat disampaikan seperti berikut. *Pertama*, Perlu dibuat Peraturan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan aspek kelembagaan yang kuat untuk semua jenis perpustakaan (perpustakaan umum, perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi dan perpustakaan khusus).

Kedua, mendorong pengembangan dan penataan kelembagaan perpustakaan yang meliputi organisasi dan proses tatalaksana (proses bisnis internal) serta pengelolaan sumber daya yang efektif, intensif dan berkesinambungan. *Ketiga*, perpustakaan didorong untuk meningkatkan kualitas kelembagaan yang berorientasi kepada Standar Nasional Perpustakaan (SNP) dan perlu diperbanyak perpustakaan yang terakreditasi. *Keempat*, perlu adanya *political will* dan intervensi pemerintah dalam penganggaran urusan perpustakaan di daerah dengan menerapkan penganggaran berbasis kinerja (*Performance base on budgetting*) yang berorientasi pada prinsip *money follow programme* artinya program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritas dalam mendapatkan anggaran.

Kelima, perlu kebijakan agresif bidang penganggaran terkait dana dekonsentrasi dan dana alokasi khusus sehingga kesinambungan dan percepatan program dan kegiatan perpustakaan antara wilayah dan daerah menjadi seimbang. *Keenam*, perlu meningkatkan rasio ketercukupan tenaga perpustakaan baik sebagai pustakawan maupun sebagai tenaga teknis perpustakaan. *Ketujuh*, perlu meningkatkan kapabilitas dan kapasitas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan dengan memberikan pelatihan yang bersertifikasi serta memberikan tunjangan profesi pustakawan. *Kedelapan*, sebaiknya pada saat rekrutmen Pegawai Negeri Sipil diberi juga formasi yang cukup untuk pustakawan.

Kesembilan, perlu menghadirkan bangunan dan ruang perpustakaan yang representative sebagai sarana untuk kenyamanan pemustaka menggunakan layanan perpustakaan. Misalnya ketika perpustakaan ingin menyediakan ruang publik sebagai area diskusi bagi pemustakanya, maka ruangan tersebut perlu dilengkapi dengan pendingin ruangan (AC), LCD, Teater Mini dan lain sebagainya. *Kesepuluh*, untuk pengadaan prasarana perpustakaan perlu dipertimbangkan nilai ekonomis, estetis, fungsional, tahan lama

serta mudah pemeliharannya. *Kesebelas*, perlu diperbaiki dan ditingkatkan manajemen pengadaan bahan atau koleksi perpustakaan yang mutakhir dengan memperhatikan analisis kesesuaian dan kebutuhan pemustaka.

Kedua belas, perlu ditingkatkan pemanfaatan teknologi informasi melalui digitalisasi perpustakaan, sehingga pemustaka dengan mudah dan cepat dapat mengakses kebutuhan informasinya. *Ketiga belas*, Memperluas dan meningkatkan kegiatan sosialisasi dan edukasi yang melibatkan masyarakat tentang pentingnya minat baca dan literasi. *Keempat belas*, perpustakaan perlu merubah strategi pelayanan dengan istilah "jemput bola". Perpustakaan memperbanyak menghadirkan pustaka keliling, taman baca atau pojok baca sehingga lebih mendekatkan perpustakaan kepada pemustaka atau masyarakat. *Terakhir*, Perpustakaan perlu menjalin kerjasama dengan instansi lain, seperti dinas informasi dan komunikasi untuk membuat dan menghadirkan fitur-fitur bacaan melalui media online.

KESIMPULAN

Hasil Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat di Sumatera Utara pada Tahun 2021 adalah sebesar 12,40 dan masuk pada kategori CUKUP. Mayoritas responden sangat setuju bahwa ada enam aspek yang menjadi kendala dan hambatan perpustakaan selama ini dalam meningkatkan indeks pembangunan literasi masyarakat yaitu aspek kelembagaan, aspek pendanaan, aspek sumber daya manusia, aspek sarana dan prasarana, aspek bahan koleksi serta aspek minat baca. Rekomendasi yang diberikan dalam strategi peningkatan indeks pembangunan literasi masyarakat di Sumatera Utara meliputi keenam aspek tersebut.

REKOMENDASI

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terkait Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat di Sumatera Utara pada Tahun 2021, maka ada beberapa saran yang dilakukan, antara lain:

1. Perpustakaan Provinsi Sumatera Utara perlu membuat database terkait dengan data dan informasi unsur-unsur pengukuran indeks pembangunan literasi masyarakat dan minat baca masyarakat secara terintegrasi.
2. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas dan memperbanyak responden penelitian guna mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang objek yang diteliti.

UCAPAN TERIMAKASIH

Tim Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara yang telah mendanai

penelitian, seluruh penanggungjawab dan pegawai perpustakaan yang menjadi sampel penelitian, serta semua pihak yang telah berkontribusi hingga terbitnya artikel ini. Semua penulis dalam artikel ini merupakan kontributor utama.

DAFTAR PUSTAKA

Aftina Nurul Husna, Dwi Yuliani, Titik Rachmawati, Dini Eka Angraini, Rofi Anwar, R. U. 2021. Program Literasi Digital untuk Pengembangan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Desa Sedayu, Muntilan, Magelang. *Jurnal Community Empowerment*, 6, 156-166.

Ali Romdhoni. 2013. Al-Qur'an dan Literasi. Literatur Nusantara.

Andy Alayyubi. 2001. Pustakawan, Ilmuwan, dan Dialog Interaktif Metro TV.

BPS. 2018. Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) - Modul Sosial Budaya dan Pendidikan. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Fang, Z. and Wei, Y. 2010. "Improving Middle School Students' Science Literacy Through Reading Infusion". *The Journal of Educational Research*. 103 (4), 262-273.

Hasnadi. 2019. Membangun Budaya Literasi Informasi Pada Perguruan Tinggi. *Jurnal Abulyatama*, 610-620.

Husnul, Fuadi, Annisa, Zikri Robbia. Jamaluddin, Jamaluddin, A. W. J. 2020. Analisis Faktor Penyebab Rendahnya Kemampuan Literasi Sains Peserta Didik. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*.

Kemendikbud. 2019. Indeks Aktivitas Literasi Membaca 34 Provinsi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019.

Kern, R. 2000. Literacy and Language Teaching. Oxford University Press.

Mackall Joe. 2004. Research and Information Management. Ferguson.

Muhammad Farid. 2018. Fenomenologi Dalam Penelitian Ilmu Sosial. Kencana.

Mulyadi. 2013. Perpustakaan Sebagai Literasi Informasi Bagi Pemustaka. *Tamaddun*, XIII, 325-338.

Mursalim. 2017. Penumbuhan Budaya Literasi Dengan Penerapan Ilmu Keterampilan Berbahasa (Membaca dan Menulis). *Jurnal CaLLs*, 3. <http://e-journals.unmul.ac.id/index.php/CALLS/article/view/815>.

Muslimin. 2018. Penumbuhan Budaya Literasi Melalui Peningkatan Minat Baca Masyarakat Desa. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 107-118.

OECD. 2019. Programme for International Student Assessment.

Pangesti Widarti dkk. 2016. Desain Induk Gerakan Literasi Sekolah. Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2020- 2024.

Perpustakaan Nasional RI. 2020. Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024. Jakarta: Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus.

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan.

Wiyono. 2017. Literasi Pendidikan. Sinar Jaya.

Yanuar Yoga Prasetyawan. 2018. Pengembangan Instrumen Pengukuran Kemampuan Literasi Informasi Berbasis Efikasi Diri. *Jurnal ANUVA*.

Yosal Iriantara. 2009. Literasi Media: Apa, Mengapa, dan Bagaimana. Simbiosis Rekatama Media.